

Nomor/Number : 011/MTI/CORSEC/EXT/III/2021  
Lampiran/Attachment : 1 (satu) eksemplar

Jakarta, 31 Maret 2021

**Kepada Yth :**

- 1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**  
di Gedung Soemitro Djojohadikusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,  
Sawah Besar  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710
- 2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3  
PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building  
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

**Perihal : Bukti Pengumuman Koran Laporan  
Keuangan Tahunan Konsolidasian  
PT Mora Telematika Indonesia dan  
Entitas Anak per tanggal 31  
Desember 2020 dan 2019 (Diaudit)**

**Subject : Advertisement Submission of the  
Consolidated Annual Financial  
Statements of PT Mora Telematika  
Indonesia and its Subsidiary as of  
December 31<sup>st</sup>, 2020 and 2019  
(Audited)**

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (selanjutnya disebut "**XK2**"); Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut "**IDX IE**"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31**"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 7**"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya ("**PWA OB**"); Ketentuan Perjanjian

*In order to comply with the regulation of the Rule Number X.K.2 concerning Obligations to Submit Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies (hereinafter referred to as "**XK2**") Indonesia Stock Exchange number I-E regarding the Obligation of Information Submission (hereinafter referred to as "**IDX IE**"); Financial Services Authority Regulation number 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by issuers or Public Companies ("**POJK 31**"); Financial Services Authority Regulation Number 7/POJK.04/2018 concerning Submission of Reports Through the Electronic Reporting System of Issuers or Public Companies ("**POJK 7**"); Provisions of the 2017 Moratelindo Bonds I Trustee Agreement number 65 dated 25 September 2017 and its amendments ("**PWA OB**"); Provisions of the Moratelindo Phase*

**DISCLAIMER:**

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya (“PWA SI”); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 nomor 46 tanggal 17 Juli 2020 beserta perubahan-perubahannya (“PWA SII”); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 nomor 30 tanggal 18 September 2020 beserta perubahan-perubahannya (“PWA SIII”); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 nomor 26 tanggal 16 April 2021 beserta perubahan-perubahannya (“PWA SIV”)

Dengan hormat,

Berdasarkan XK2, IDX IE, POJK 31, POJK 7, PWA OB, PWA SI, PWA SII, PWA SIII dan PWA SIV, melalui surat ini kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia mengenai penyampaian Bukti Iklan atas Surat Keterbukaan Informasi sebagaimana disebutkan diatas.

Bahwa Informasi tersebut dimuat dalam surat kabar Kompas halaman 10, pada hari Rabu, 31 Maret 2021.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

*I Year 2019 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 9 dated April 1, 2019 and its amendments (“PWA SI”), Moratelindo Phase II Year 2020 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 46 dated 17 July 2020 and its amendments (“PWA SII”), Moratelindo Phase III Year 2020 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 30 dated September 18, 2020 and its amendments (“PWA SIII”), Moratelindo Phase IV Year 2021 Shelf Offering Sukuk Ijarah Trustee Agreement number 26 dated April 16, 2021 and its amendments (“PWA SIV”)*

*Dear Sirs/Madam,*

*In order to comply XK2, IDX IE, POJK 31, POJK 7, PWA OB, PWA SI I, PWA SI II, PWA SI III and PWA SI IV, through this letter, we convey to the Financial Services Authority and PT Bursa Efek Indonesia regarding the Advertisement Submission on the Public Disclosure Letter as mentioned above.*

*The information published in the Kompas newspaper page 10, on Wednesday, March 31<sup>st</sup>, 2021.*

*If there is information needed regarding this letter related to legal issues, please contact Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id or corsec@moratelindo.co.id) and related to financial issues and accounting, please contact Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).*

**DISCLAIMER:**

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail

Hormat Kami/*Sincerely Yours*,  
**PT Mora Telematika Indonesia**

[signed]

---

**Nama/Name** : Henry Rizard Rumopa  
**Jabatan/Title** : Sekretaris Perusahaan

**Tembusan/CC :**

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
2. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah I, II, III dan IV; dan
3. Arsip

**DISCLAIMER:**

This Document is a translation of an official document issued by the respective party. Every effort has been made to ensure that the contents of this document are identical, accurate, and faithful to that published in Bahasa Indonesia. If there are discrepancies between the Bahasa Indonesia and English document, the Bahasa Indonesia document shall prevail



## PERIKANAN

## Aplikasi Digital Belum Sentuh Nelayan Kecil

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menggulirkan aplikasi digital perikanan tangkap untuk mengfisienkan penangkapan ikan. Upaya itu dinilai sebagai salah satu solusi nelayan menghadapi cuaca ekstrem perairan dan dampak perubahan iklim.

Namun, penggunaannya belum menyentuh nelayan kecil. Aplikasi "Laut Nusantara" yang dikembangkan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertujuan membantu nelayan dalam merencanakan kegiatan penangkapan ikan. Aplikasi menampilkan pemetaan citra satelit sebaran ikan dan potensi titik berkumpul ikan jenis tertentu, seperti lemuru, tuna, dan cakalang.

Perangkat teknologi informasi juga dapat mengalkulasi kebutuhan bahan bakar minyak kapal nelayan berdasarkan jenis mesin, kecepatan, dan jarak tempuh. Aplikasi juga menampilkan fitur pencatatan hasil tangkapan nelayan serta estimasi harga jual ikan di beberapa perubahan perikanan.

Ketua Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengatakan, dampak perubahan iklim membuat nelayan kecil semakin sulit mendapatkan ikan. Musim tangkapan ikan semakin sulit ditebak. Aplikasi Laut Nusantara yang diharapkan memudahkan nelayan menangkap ikan belum ditopang sosialisasi dan pemahaman nelayan. Sebagian nelayan kecil juga masih kesulitan mencatat hasil tangkapan.

"Aplikasi sangat membantu, tetapi belum ada sosialisasi. Proses sosialisasi harus tepat sasaran, siapa yang dituju dan siapa yang bertanggung jawab dalam pencatatan. Kelompok nelayan perlu dilibatkan," katanya, Selasa (30/3/2021).

Budi menambahkan, selama puluhan tahun nelayan kecil terbiasa mengandalkan faktor alam dalam menentukan lokasi tangkapan ikan dan tidak terbiasa mencatat hasil tangkapan. Ikan tangkapan langsung diserahkan kepada pengepul. Nelayan hanya fokus pada nilai jual ikan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sisi lain, sebagian nelayan belum melek digital kendati memiliki perangkat telepon genggam.

Berdasarkan data KKP, aplikasi Laut Nusantara diunduh 52.000 pengguna. Jumlah nelayan di Indonesia 2 juta orang.

Sekretaris Asosiasi Tuna Indonesia (Astuni) Wilayah Jakarta Muhammad Bilahar menyampaikan, kesahihan data terkini untuk pemetaan sebaran ikan perlu dibuktikan. "Jangan sampai biaya operasional terbuang percuma karena salah informasi," katanya.

Menurut Kepala Pusat Riset Kelautan BRSDM I Nyoman Radiarta, aplikasi itu terus diperbarui dan telah mencapai versi kelima, bersinergi dengan PT XL Axiata Tbk. (LKT)

## Lapor SPT Tahunan di Masa Pandemi



KOMPAS/PRIVYMOBDO

Suasana pelayanan wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi tahun 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (30/3/2021). Meski telah dianjurkan melapor secara elektronik melalui e-filing, sebagian wajib pajak tetap datang ke kantor untuk melapor secara konvensional atau memperoleh *electronic filing identification number* (EFIN). Proses pelaporan tatap muka dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan berdasarkan domisili wajib pajak. Batas akhir pelaporan SPT PPH tahun 2020 pada 31 Maret 2021.

## Stimulus Lanjutan Ditunggu

Kebijakan berupa stimulus lanjutan bagi sektor keuangan diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan rasio kredit macet. Kenaikan rasio kredit macet mengganggu pemulihan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS — Situasi pandemi Covid-19 membuat ruang ekspansi kredit perbankan menjadi terbatas karena risiko kredit meningkat. Perlu kebijakan stimulus lanjutan dari regulator untuk mengantisipasi segala risiko yang mengintai perbankan.

Data Bank Indonesia menunjukkan, kredit perbankan tumbuh minus 2,3 persen secara tahunan per Februari 2021. Sementara rasio kredit bermasalah atau NPL bruto per Januari 2021 sebesar 3,17 persen, sedangkan rasio NPL neto 1,03 persen.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, sektor perbankan membutuhkan reformasi kebijakan susulan untuk menghindari NPL membengkak pada 2023. Sebab, kebijakan restrukturisasi kredit perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya berlaku hingga 31 Maret 2022.

"Kalau tidak ada kebijakan susulan, yang terjadi adalah tiba-tiba NPL pada 2023 bisa

melonjak mencapai dua angka, mengingat indikator LAR sudah mencapai 23 persen," kata Aviliani dalam webinar, Selasa (30/3/2021).

LAR menunjukkan risiko atas kredit yang disalurkan perbankan.

Jika risiko kenaikan rasio NPL perbankan nasional tidak dimitigasi, proses pemulihan ekonomi akan terganggu. Perencanaan nasional yang seharusnya mulai membaik bisa kembali turun karena peringkat investasi Indonesia akan otomatis turun jika risiko perbankan nasional meningkat.

Kebijakan penyelamatan bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga harus permanen. Menurut Aviliani, kebijakan ini perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sektor Keuangan yang tengah digodok pemerintah.

Sejak pertengahan tahun lalu, LPS bisa menyelamatkan bank-bank kecil selama pandemi Covid-19. Hal ini diatur dalam Peraturan LPS Nomor 3 Tahun 2020, sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor

33/2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Penyelamatan bank sakit perlu dilakukan LPS sebelum bank tersebut menjadi bank gagal dan berdampak sistemik dalam sektor keuangan. Adapun saat ini kewenangan penyelamatan bank sakit oleh LPS bersifat temporer hanya saat pandemi Covid-19," ujarnya.

Sebelum pandemi Covid-19, LPS baru akan hadir ketika ada bank yang dilikuidasi.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, di tengah pandemi, risiko usaha meningkat drastis dibandingkan dengan situasi normal. Artinya, risiko kredit menjadi tinggi dan membuat kredit yang sudah disalurkan perbankan terancam macet.

"Bank memang tidak akan mengelontorkan kredit karena risiko yang besar. Di sisi lain, dunia usaha—yang sekarang terbatas pandemi—juga tidak

## SURAT UTANG NEGARA

## Tekanan terhadap Pasar Obligasi Hanya Sementara

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah sentimen negatif masih membayangi pasar obligasi atau surat utang Pemerintah Indonesia. Namun, tren rendahnya hasil lelang surat utang negara diproyeksi tidak akan berlangsung lama. Ke depan, pasar obligasi dalam negeri diprediksi kembali perkasa dipengaruhi surat utang Pemerintah Amerika Serikat yang akan segera memasuki periode penurunan imbal hasil.

Pemerintah akan melelang surat utang negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan tersebut, pemerintah kembali menggelar lelang SUN pada Selasa (30/3/2021). Penjualan SUN akan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan Bank Indonesia.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, pada lelang Selasa ini, jumlah penawaran yang disampaikan peserta lelang sebesar Rp 33,95 triliun dan pemerintah memenangi Rp 4,75 triliun.

Jumlah tersebut turun dari lelang pada 16 Maret 2021 yang kala itu total nilai penawarannya Rp 40,08 triliun. Dari hasil itu, pemerintah memenangi Rp 18,9 triliun. "Jumlah penawaran di setiap lelang cenderung turun karena dampak dari kondisi pasar saat ini sedang dipengaruhi oleh sentimen kenaikan imbal hasil *US Treasury*," ujar Deni, Selasa.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto optimistis imbal hasil *US Treasury* akan turun dalam waktu dekat. Penurunan itu akan didorong oleh efek paket stimulus ekonomi AS. Di sisi lain, prospek penguatan pasar obligasi Indonesia akan ditopang oleh kebijakan-kebijakan BI yang akomodatif terhadap pasar surat utang. "Salah satunya adalah BI memperbolehkan perbankan turut lelang SUN," kata dia.

Sementara Head of Economics Research Pefindo Fikri C Permana menyatakan, imbal hasil *US Treasury* kemungkinan turun ke kisaran 1,2-1,3 persen pada akhir 2021. Pasalnya, prospek konsumsi masyarakat AS yang belum akan tumbuh dan membuat laju inflasi terjaga. (DIM)

## KILAS EKONOMI

## Digitalisasi Wakaf Sasar Generasi Milenial

Generasi milenial yang akrab dengan teknologi digital menjadi salah satu sasaran wakaf, terutama wakaf uang. Oleh karena itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan secara virtual dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2021, Selasa (30/3/2021), mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin menunaikan wakaf. Rapat yang juga digelar secara tatap muka di Bekasi, Jawa Barat, itu mengambil tema "Era Baru Perwakafan Nasional: Wakaf Uang dan Transformasi Digital". Salah satu persoalan yang dihadapi dunia perwakafan saat ini adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, terutama wakaf uang. (NTA)

## Indosat Ooredoo Jual Menara Rp 10,86 Triliun

PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo sepakat menjual lebih dari 4.200 menara senilai 750 juta dollar AS kepada PT Epid Menara Asset Co, anak usaha Edge Point. Dengan nilai tukar berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, Selasa (30/3/2021), nilai itu setara Rp 10,86 triliun. Indosat Ooredoo akan menyewa kembali menara-menara tersebut selama 10 tahun. "Perjanjian sewa kembali akan memenuhi kebutuhan menara yang sedang berjalan, sedangkan modal memberikan amunisi lebih lanjut untuk menggerakkan momentum pertumbuhan pada 2021," kata President Director & CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama dalam siaran pers. Suresh Sidhu, CEO Edge Point Group, mengatakan, kesepakatan ini merupakan salah satu yang terbesar di Asia. (\*/IDR)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN		2020		2019	
31 DESEMBER 2020 DAN 2019					
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan setara kas	494.777.973.772	1.432.164.203.492			
Aset pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000			
Piutang usaha	5.972.229.736	2.662.085.347			
Pihak berelasi					
Pihak ketiga					
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar					
Rp 19.431.188.627 dan					
Rp 12.139.756.573 pada tanggal					
31 Desember 2020 dan 2019	390.055.126.311	365.489.488.383			
Piutang lain-lain	9.425.879.616	12.096.550.469			
Bagian aset tidak lancar yang jatuh tempo dalam setahun:					
Piutang konsesi jasa	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920			
Uang muka	12.018.186.704	33.367.942.282			
Biaya dibayar dimuka	102.262.438.098	76.569.478.392			
Pajak dibayar dimuka	218.807.271.471	276.773.611.239			
Aset lain-lain	40.019.849.662	24.678.441.461			
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>2.779.603.714.290</b>	<b>3.730.066.559.985</b>			
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Aset yang dibatasi penggunaannya	5.203.306.285	5.904.094.734			
Investasi	-	-			
Aset tidak lancar - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Piutang konsesi jasa	-	-			
Uang muka	4.805.930.010.713	4.985.198.283.185			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.075.679.588.848 dan Rp 763.833.897.971 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	5.560.472.613.002	4.036.546.371.044			
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar					
Rp 536.788.111 dan Rp 405.314.696 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	2.384.418.889	2.515.872.304			
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp 6.348.559.546 dan Rp 5.352.578.476 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	734.940.030	190.784.834			
Aset hak-guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 59.686.942.937 pada tanggal 31 Desember 2020	163.479.750.575	-			
Aset pajak tangguhan	4.044.727.261	7.250.865.308			
Aset lain-lain	73.669.039.539	28.265.065.487			
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>10.615.918.806.294</b>	<b>9.065.871.336.896</b>			
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>13.395.522.520.584</b>	<b>12.795.937.896.881</b>			
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
<b>LIABILITAS LANCAR</b>					
Utang usaha	14.260.920.100	6.005.330.539			
Pihak berelasi	678.973.019.341	605.694.751.292			
Pihak ketiga					
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar					
Rp 3.774.000					
Utang pajak	112.673.177.534	116.453.895.870			
Utang lain-lain	16.693.831.960	29.549.539.781			
Beban akrual	70.345.694.169	38.169.028.516			
Uang muka penjualan	2.540.358.909	26.350.846.961			
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun:					
Utang bank	954.401.804.443	1.760.476.321.040			
Utang obligasi	-	537.996.897.073			
Liabilitas sewa	48.421.582.510	19.266.814.917			
Utang pinjaman	11.270.769.682	13.482.391.473			
Pendapatan ditangguhkan	23.204.325.364	24.868.597.797			
<b>Jumlah Liabilitas lancar</b>	<b>1.932.789.258.012</b>	<b>3.178.349.312.376</b>			
<b>LIABILITAS TIDAK LANCAR</b>					
Utang usaha - pihak ketiga	575.754.822.578	62.630.784.684			
Liabilitas pajak tangguhan	40.842.406.696	2.090.170.498			
Utang muka penjualan	405.507.785.560	135.809.718.725			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	3.960.295.413.884	4.661.859.827.918			
Utang obligasi	457.840.131.932	456.931.511.214			
Sukuk syariah	1.655.230.739.572	991.884.251.202			
Liabilitas sewa	107.227.136.019	69.829.464.033			
Utang pinjaman	10.719.694.360	21.672.416.669			
Pendapatan ditangguhkan	106.920.082.879	111.872.251.761			
Utang kepada pemegang saham	844.408.372.000	844.408.372.000			
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	90.526.628.604	66.028.777.663			
<b>Jumlah Liabilitas Tidak Lancar</b>	<b>8.255.273.214.084</b>	<b>7.424.817.546.364</b>			
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>10.188.062.472.096</b>	<b>10.603.166.858.740</b>			
<b>EKUITAS</b>					
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>					
Modal saham					
Seni A - nilai nominal Rp 100.000 per saham					
Seni B - nilai nominal Rp 809.349 per saham					
Modal dasar ditempatkan dan disetor					
Seni A - 250.000 saham	298.750.159.015	298.750.159.015			
Seni B - 338.235 saham	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)			
Tambahan modal disetor	431.812.510.351	104.324.191.232			
Surplus revaluasi aset	59.750.031.803	25.000.000.000			
Cadangan umum	2.126.186.016.166	1.576.248.449.298			
Saldo laba	23.788.420.072	22.847.979.351			
Komponen ekuitas lainnya					
<b>Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>	<b>2.937.757.048.495</b>	<b>2.024.640.689.984</b>			
<b>Kepentingan Nonpengendali</b>	<b>269.702.999.993</b>	<b>168.130.348.157</b>			
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>3.207.460.048.488</b>	<b>2.192.771.038.141</b>			
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>13.395.522.520.584</b>	<b>12.795.937.896.881</b>			